

TANTANGAN PENGAWASAN PUBLIK PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN PANDEGLANG

Viyulia^{1*}, Nadia Fatima²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya, ²STIA Maulana Yusuf Banten

Email*: viyuliav@gmail.com

Abstrak. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi bagi peserta didik. Namun, implementasi program ini di daerah menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam aspek pengawasan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan pengawasan publik terhadap pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Pandeglang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada sekolah dasar negeri, perangkat daerah, serta komite sekolah. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan pengawasan publik meliputi keterbatasan transparansi anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi antar-instansi, serta belum optimalnya mekanisme pengaduan publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem transparansi digital, peningkatan literasi pengawasan masyarakat, serta integrasi pengawasan internal dan eksternal untuk mewujudkan tata kelola program yang akuntabel dan responsif.

Kata Kunci: Pengawasan Publik, Kebijakan Publik, Makan Bergizi Gratis, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat.

Abstract. The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a strategic government policy aimed at improving the quality of human resources through nutritional interventions for students. However, the implementation of this program in the regions faces various challenges, particularly in terms of public oversight. This study aims to analyze the challenges of public oversight of the MBG Program implementation in Pandeglang Regency and identify factors that influence its effectiveness. The study used a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observation, and documentation at public elementary schools, regional apparatuses, and school committees. Data analysis used the Miles and Huberman interactive model. The results show that challenges to public oversight include limited budget transparency, low public participation, weak inter-agency coordination, and a suboptimal public complaints mechanism. This study recommends strengthening the digital transparency system, increasing public oversight literacy, and integrating internal and external oversight to achieve accountable and responsive program governance.

Keywords. Public Oversight, Public Policy, Free Nutritious Meals, Accountability, Community Participation.

Copyright©2026. Viyulia, Nadia Fatima

This is an open access article under the CC-BY NC-SA license

DOI: <https://doi.org/10.1234/ssrj.v3i2.77>

PENDAHULUAN

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan agenda strategis dalam kebijakan publik di Indonesia. Salah satu determinan utama kualitas SDM adalah status gizi anak usia sekolah. Masalah kekurangan gizi, stunting, dan ketimpangan akses pangan sehat masih menjadi tantangan struktural yang berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran dan produktivitas jangka panjang. Laporan nasional menunjukkan bahwa persoalan gizi tidak hanya berkorelasi dengan kesehatan fisik, tetapi juga

memengaruhi kemampuan kognitif, konsentrasi belajar, dan capaian akademik peserta didik (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Dalam konteks kebijakan publik, intervensi berbasis pemberian makanan di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis untuk mengatasi masalah tersebut. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat akses gizi bagi peserta didik, khususnya di daerah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi. Program ini tidak hanya berdimensi kesehatan, tetapi juga merupakan kebijakan sosial-ekonomi yang menyentuh aspek pemerataan dan keadilan sosial.

Kabupaten Pandeglang, sebagai bagian dari Provinsi Banten, menunjukkan dinamika kesejahteraan yang signifikan namun masih menghadapi tantangan struktural dalam aspek kemiskinan dan gizi. Pada tahun 2024, persentase kemiskinan di wilayah ini tercatat sebesar 9,18% dari total penduduk sekitar 1,41 juta jiwa, sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 9,27% atau sekitar 121.693 jiwa masyarakat miskin. Data ini menunjukkan tren penurunan kemiskinan namun tetap berada di level yang relatif tinggi dibandingkan beberapa kabupaten/kota di Banten. Selain itu, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *undernourishment* di Kabupaten Pandeglang mencapai 2,7% pada tahun 2024, meskipun angka ini lebih rendah dari rata-rata nasional, tetapi tetap mencerminkan adanya kelompok yang berisiko mengalami kekurangan energi dan nutrisi. Data empiris tersebut mencerminkan pentingnya intervensi seperti Program Makan Bergizi Gratis dalam menjamin akses pangan bergizi bagi anak sekolah dan masyarakat rentan di daerah ini

Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh desain program, tetapi juga oleh tata kelola dan sistem pengawasan yang menyertainya. Dalam perspektif administrasi publik, pengawasan (*control*) merupakan fungsi manajerial yang memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan, standar, dan ketentuan yang telah ditetapkan (Denhardt & Denhardt J.V, 2015). Pengawasan publik menjadi krusial dalam konteks program berbasis anggaran besar dan bersentuhan langsung dengan masyarakat luas.

Konsep akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi utama dalam pengawasan kebijakan publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi anggaran dan mekanisme pelaporan yang terbuka memungkinkan masyarakat melakukan kontrol sosial secara efektif (Mardiasmo, 2018). Tanpa sistem pengawasan yang kuat, program publik berpotensi menghadapi risiko penyimpangan, penurunan kualitas layanan, serta inefisiensi anggaran.

Selain pengawasan internal oleh pemerintah, partisipasi masyarakat dalam monitoring kebijakan juga merupakan elemen penting dalam kerangka *good governance*. Partisipasi publik tidak hanya terjadi pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam evaluasi dan pengawasan implementasi kebijakan (Denhardt & Denhardt J.V, 2015). Dalam praktiknya, tingkat partisipasi masyarakat sering kali dipengaruhi oleh akses informasi, literasi kebijakan, serta efektivitas saluran pengaduan yang tersedia.

Tantangan pengawasan publik di Kabupaten Pandeglang dalam Program MBG dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti keterbatasan transparansi penggunaan anggaran, lemahnya koordinasi antar-instansi, minimnya pemanfaatan teknologi

informasi untuk pelaporan, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses monitoring. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas distribusi makanan, standar gizi, dan keberlanjutan program secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme pengawasan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pandeglang, serta mengidentifikasi tantangan struktural dan administratif yang memengaruhi efektivitas pengawasan. Kajian ini penting tidak hanya sebagai kontribusi akademik dalam bidang administrasi publik, tetapi juga sebagai rekomendasi praktis dalam memperkuat tata kelola kebijakan sosial berbasis akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu agenda prioritas nasional dalam pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan anak. Program ini dirancang untuk mengatasi masalah stunting, kekurangan gizi, serta ketimpangan akses pangan sehat bagi peserta didik, khususnya di daerah tertinggal dan berisiko kemiskinan. Selain itu, Kabupaten Pandeglang yang merupakan salah satu daerah dengan karakteristik wilayah rural dan tingkat kesejahteraan yang beragam, implementasi program MBG memiliki urgensi tinggi. Namun, sebagaimana kebijakan publik lainnya, efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga oleh mekanisme pengawasan publik yang berjalan.

Dalam perspektif administrasi publik, pengawasan publik merupakan instrumen penting untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan integritas pelaksanaan kebijakan. Tanpa pengawasan yang efektif, potensi penyimpangan anggaran, penurunan kualitas makanan, serta distribusi yang tidak merata dapat terjadi. Adapun tujuan penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme pengawasan publik pada Program MBG di Kabupaten Pandeglang, apa saja tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan publik tersebut? dan bagaimana strategi penguatan pengawasan publik yang relevan dengan konteks daerah?

LITERATURE REVIEW

Pengawasan Publik

Menurut teori pengawasan dalam administrasi publik, pengawasan merupakan proses sistematis untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan publik mencakup pengawasan internal (oleh pemerintah) dan eksternal (oleh masyarakat dan lembaga independen).

Pengawasan publik merupakan mekanisme kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat memantau dan menilai pelaksanaan kebijakan publik. Menurut (Denhardt & Denhardt J.V, 2015), pengawasan publik adalah instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), karena memastikan bahwa kebijakan dijalankan secara akuntabel dan transparan. Dalam konteks kebijakan sosial, pengawasan publik mencakup dua dimensi utama:

- 1) Pengawasan internal: dilakukan oleh pemerintah melalui audit, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program.
- 2) Pengawasan eksternal: dilakukan oleh masyarakat, media, LSM, dan lembaga independen.

Penelitian oleh Bovens (2007) menegaskan bahwa pengawasan publik yang efektif bergantung pada keterbukaan informasi dan partisipasi aktif masyarakat.

Keterbatasan kedua faktor ini sering kali menjadi penyebab rendahnya akuntabilitas dalam implementasi program sosial.

Konsep Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas publik mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Transparansi menjadi prasyarat utama agar publik dapat melakukan kontrol sosial secara efektif. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan program publik. Menurut (Mardiasmo, 2018), transparansi anggaran memungkinkan masyarakat mengetahui alokasi, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana publik. Akuntabilitas, di sisi lain, memastikan pemerintah bertanggung jawab terhadap hasil program.

Dalam konteks program makanan bergizi, transparansi anggaran menjadi indikator penting untuk memastikan kualitas dan kuantitas makanan yang disediakan sesuai standar gizi (WHO, 2020). Penelitian di Jawa Timur oleh (Handayani et al., 2025) menunjukkan bahwa kurangnya transparansi anggaran di sekolah menyebabkan distribusi makanan bergizi tidak merata dan berdampak pada efektivitas program.

Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik

Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam monitoring dan evaluasi kebijakan. Partisipasi masyarakat adalah dimensi penting dalam pengawasan eksternal. Menurut (Arnstein, 1969), partisipasi dapat diklasifikasikan dari tingkat manipulasi hingga pemberdayaan penuh masyarakat. Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin besar peluang program publik berjalan sesuai tujuan.

Dalam konteks pendidikan dan gizi, penelitian oleh (Nugroho, 2025) di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dan komite sekolah dalam pengawasan program makanan bergizi meningkatkan kepatuhan sekolah terhadap standar gizi dan distribusi yang tepat sasaran.

Tantangan Pengawasan Program Makanan Bergizi

Beberapa penelitian mengidentifikasi tantangan utama dalam pengawasan program makanan bergizi meliputi :

- 1) Keterbatasan informasi dan literasi masyarakat Orang tua dan masyarakat sering tidak memiliki akses informasi yang memadai tentang program, sehingga pengawasan eksternal sulit dilakukan (Bovens, 2007).
- 2) Lemahnya koordinasi antar-instansi. Koordinasi antara dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan pihak sekolah sering tidak optimal, sehingga terjadi ketidaksesuaian standar pelaksanaan (Handayani et al., 2025).
- 3) Belum optimalnya mekanisme pengaduan. Sistem pengaduan manual menyebabkan keluhan masyarakat lambat ditangani dan mengurangi efektivitas kontrol sosial (Nugroho, 2025).
- 4) Ketidakmerataan distribusi program. Penelitian di beberapa kabupaten di Indonesia menunjukkan bahwa daerah pedesaan seringkali menerima perhatian lebih sedikit dibandingkan daerah perkotaan dalam hal pengawasan dan kualitas makanan (WHO, 2020).

Konsep Good Governance dan Pengawasan Publik

Good governance menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan responsivitas. Menurut (Kettl, 2015), pengawasan publik yang efektif merupakan salah satu pilar utama tata kelola yang baik, karena menyediakan mekanisme checks and balances yang mencegah penyimpangan dan meningkatkan kualitas layanan publik. Dalam konteks Program MBG, pengawasan publik yang baik dapat membantu memastikan bahwa 1).Standar gizi dipenuhi; 2).Distribusi makanan tepat sasaran; 3).Laporan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan; 4).Partisipasi masyarakat dan pengaduan publik berjalan secara efektif.

Sejumlah penelitian sebelumnya menekankan bahwa penguatan literasi masyarakat, integrasi teknologi informasi, serta pengawasan internal dan eksternal yang sinergis merupakan strategi utama untuk meningkatkan efektivitas program sosial (Denhardt & Denhardt, 2015; Handayani et al., 2021; Nugroho, 2020).

Berdasarkan literatur yang ada, pengawasan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis menghadapi tantangan struktural dan administratif, yang mencakup keterbatasan transparansi, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi antar-instansi, dan mekanisme pengaduan yang belum optimal. Kerangka good governance—yang menekankan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan responsivitas—menjadi acuan utama dalam merancang strategi pengawasan yang efektif.

Dengan demikian, studi ini berupaya mengisi gap penelitian terkait praktik pengawasan publik di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Pandeglang, dengan menekankan analisis empiris berbasis data lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pengawasan publik dalam konteks implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pada dinamika aktor, mekanisme, dan tantangan administratif yang terjadi di tingkat daerah. Menurut (Creswell, 2014), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan melalui proses interpretatif yang kompleks.

Desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu konteks spesifik, yaitu implementasi pengawasan publik Program MBG di Kabupaten Pandeglang. Studi kasus memungkinkan peneliti menggali fenomena secara mendalam dan kontekstual dalam batasan sistem tertentu (Yin, 2018). Dengan desain ini, penelitian dapat menangkap interaksi antar-aktor, dinamika kelembagaan, serta praktik pengawasan yang berlangsung secara empiris.

Lokasi penelitian ini pada Sekolah Dasar Negeri yang menjadi pelaksana Program MBG di beberapa kecamatan di Kabupaten Pandeglang, sedangkan informan penelitian meliputi kepala sekolah, guru penanggung jawab program, perwakilan Dinas Pendidikan, komite sekolah dan orang tua siswa. Adapun pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung pelaksanaan program dan studi dokumentasi, selanjutnya teknik analisis data

menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh (Miles & Huberman, 2014), yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan konsistensi informasi. Menurut (Moleong, 2018), keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dijamin melalui kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini juga melakukan member check kepada informan untuk memastikan akurasi interpretasi data.

HASIL DAN DISKUSI

Mekanisme Pengawasan Publik Program Makan Bergizi Gratis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan publik Program MBG di Kabupaten Pandeglang dilakukan melalui tiga mekanisme utama:

- 1) Pengawasan Internal oleh Pemerintah. Kepala sekolah dan pihak Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas pencatatan, laporan, dan evaluasi rutin pelaksanaan program. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala sekolah SDN 01 Pandeglang menyatakan sebagai berikut:

Kami membuat laporan mingguan dan bulanan tentang jumlah makanan yang disalurkan, kualitas menu, dan penerima manfaat. Laporan ini dikirim ke dinas pendidikan dan juga disimpan sebagai arsip sekolah (Kepala SDN 01 Pandeglang, wawancara, 2026).

Namun, observasi lapangan menunjukkan bahwa monitoring internal cenderung bersifat administratif, fokus pada kuantitas makanan dan laporan anggaran, belum sepenuhnya mengevaluasi kualitas gizi dan kepuasan siswa.

- 2) Pengawasan Eksternal oleh Masyarakat. Pengawasan eksternal dilakukan melalui komite sekolah dan orang tua siswa. Namun, partisipasi masyarakat masih terbatas. Wawancara dengan anggota komite sekolah mengungkapkan sebagai berikut:

Kami ingin lebih aktif mengawasi, tapi terkadang informasi yang kami dapat dari sekolah terbatas. Hanya laporan jumlah makanan yang dibagikan, tidak ada rincian kualitas gizi (Komite Sekolah, wawancara, 2026)

Temuan ini sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa keterbatasan informasi menjadi hambatan utama partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik (Bovens, 2007; Nugroho, 2020).

- 3) Pengawasan melalui Dokumen dan Sistem Pelaporan. Dokumentasi yang dianalisis meliputi laporan anggaran, notulen rapat evaluasi, dan catatan distribusi makanan. Meskipun ada prosedur pelaporan, mekanisme ini belum berbasis digital, sehingga akses bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lain terbatas.

Tantangan Pengawasan Publik

Berdasarkan temuan lapangan dan literatur, terdapat empat tantangan utama yang memengaruhi efektivitas pengawasan Program MBG di Kabupaten Pandeglang:

1) Keterbatasan Transparansi Anggaran

Laporan penggunaan anggaran sebagian besar hanya bersifat internal. Masyarakat tidak mendapatkan akses terbuka terhadap dokumen rinci alokasi anggaran, menu gizi, maupun laporan evaluasi distribusi. Kondisi ini sesuai dengan penelitian (Handayani et al., 2025) yang menunjukkan bahwa keterbatasan transparansi anggaran menurunkan efektivitas pengawasan program makanan bergizi.

2) Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi orang tua dan komunitas masih minimal. Beberapa orang tua mengaku tidak mengetahui mekanisme pelaporan keluhan atau standar gizi yang seharusnya diterapkan. Hal ini sejalan dengan (Arnstein, 1969) yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pengawasan agar program berjalan efektif.

3) Lemahnya Koordinasi Antar-Instansi

Koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan pihak sekolah belum optimal. Pengawasan gizi cenderung terfragmentasi, di mana Dinas Pendidikan fokus pada administrasi sekolah, sementara Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas kualitas gizi, tetapi komunikasi antar lembaga tidak terstruktur secara rutin. Temuan ini mendukung temuan literatur sebelumnya (WHO, 2020; Handayani et al., 2021) yang menekankan bahwa integrasi antar-instansi menjadi kunci keberhasilan program gizi.

4) Sistem Pengaduan Publik Belum Optimal

Mekanisme pengaduan masih manual, misalnya melalui catatan di sekolah atau laporan langsung ke kepala sekolah. Tidak ada kanal digital yang mempermudah masyarakat menyampaikan keluhan. Keterbatasan ini menyebabkan lambatnya tindak lanjut atas masalah yang muncul, mengurangi efektivitas pengawasan eksternal (Nugroho, 2025).

Dampak Tantangan terhadap Kualitas Program

Akibat dari tantangan tersebut, beberapa dampak yang terlihat pada implementasi Program MBG di lapangan adalah:

1) Distribusi makanan tidak selalu merata di beberapa sekolah, terutama di wilayah pedesaan yang jauh dari pusat logistik.

2) Variasi kualitas gizi makanan masih terjadi karena minimnya kontrol eksternal terhadap penyedia makanan.

3) Lambatnya respons terhadap keluhan masyarakat menyebabkan potensi risiko kesehatan dan ketidakpuasan penerima manfaat.

Fenomena ini sejalan dengan literatur administrasi publik, yang menunjukkan bahwa pengawasan yang lemah akan memengaruhi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, sehingga program tidak berjalan optimal (Denhardt & Denhardt, 2015; Kettl, 2015).

Strategi Penguatan Pengawasan

Berdasarkan analisis lapangan dan literatur, beberapa strategi untuk memperkuat pengawasan publik Program MBG antara lain:

1) Digitalisasi Sistem Pelaporan. Mengembangkan portal online atau aplikasi mobile untuk pengaduan, pelaporan distribusi makanan, dan transparansi anggaran.

- 2) Peningkatan Literasi Masyarakat. Sosialisasi hak pengawasan, standar gizi, dan mekanisme pengaduan kepada orang tua dan komite sekolah.
- 3) Integrasi Koordinasi Antar-Instansi. Membentuk forum rutin antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan pihak sekolah untuk evaluasi dan perbaikan bersama.
- 4) Monitoring Berbasis Data dan Indikator. Menggunakan indikator kinerja utama (key performance indicators/KPI) terkait jumlah makanan, kualitas gizi, kepuasan siswa, dan respons pengaduan publik.

Strategi ini selaras dengan prinsip good governance, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai pilar utama keberhasilan kebijakan publik (Denhardt & Denhardt, 2015; Mardiasmo, 2018).

Sintesis Temuan

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Program MBG di Kabupaten Pandeglang telah berjalan, akan tetapi pengawasan publik belum optimal. Keterbatasan transparansi, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi antar-instansi, dan mekanisme pengaduan yang kurang efektif menjadi beberapa hambatan utama oleh sebab itu implementasi strategi digitalisasi, edukasi publik, dan integrasi antar-instansi dapat menjadi solusi praktis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan publik, meningkatkan kualitas gizi, dan memastikan distribusi makanan tepat sasaran.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan pengawasan publik dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

Pertama, mekanisme pengawasan publik terhadap Program MBG di Kabupaten Pandeglang telah berjalan melalui dua jalur utama, yaitu pengawasan internal oleh pemerintah daerah dan pengawasan eksternal oleh masyarakat melalui komite sekolah dan orang tua siswa. Namun demikian, pengawasan yang dilakukan masih didominasi oleh pendekatan administratif dan belum sepenuhnya berbasis pada evaluasi kualitas gizi, kepuasan penerima manfaat, serta prinsip transparansi terbuka.

Kedua, terdapat empat tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan publik, yaitu: (1) keterbatasan transparansi anggaran dan informasi program kepada masyarakat, (2) rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi, (3) lemahnya koordinasi antar-instansi, khususnya antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, serta (4) belum optimalnya sistem pengaduan publik yang masih bersifat manual dan belum terdigitalisasi.

Ketiga, tantangan tersebut berdampak pada belum optimalnya implementasi prinsip good governance, khususnya dalam aspek akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Meskipun Program MBG memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia, efektivitasnya sangat bergantung pada sistem pengawasan publik yang kuat dan terintegrasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan publik terhadap Program MBG di Kabupaten Pandeglang masih perlu diperkuat secara struktural dan

sistemik agar mampu menjamin keberlanjutan program, kualitas layanan, serta kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Penguatan pengawasan publik bukan sekadar aspek administratif, melainkan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang demokratis dan responsif. Dalam konteks Kabupaten Pandeglang, optimalisasi transparansi, partisipasi masyarakat, dan koordinasi kelembagaan menjadi kunci dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar mencapai tujuan peningkatan kualitas gizi dan pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa saran dan rekomendasi adalah sebagai berikut:

Saran Kebijakan (Policy Recommendation)

- a) Penguatan transparansi digital. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem pelaporan berbasis digital yang memungkinkan publik mengakses informasi mengenai alokasi anggaran, standar menu gizi, serta laporan evaluasi program secara terbuka dan berkala.
- b) Integrasi koordinasi antar-Instansi. Diperlukan forum koordinasi rutin antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan pihak sekolah untuk memastikan standar gizi, distribusi makanan, serta evaluasi program dilakukan secara terpadu dan tidak terfragmentasi.
- c) Penguatan sistem pengaduan publik. Pemerintah daerah perlu menyediakan kanal pengaduan berbasis teknologi informasi (misalnya aplikasi atau hotline resmi) yang responsif, transparan, dan terukur dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat.

Saran Praktis (Operational Recommendation)

- a) Peningkatan literasi pengawasan masyarakat. Sekolah dan pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi kepada orang tua dan komite sekolah mengenai hak pengawasan publik, mekanisme pelaporan, serta standar kualitas gizi makanan.
- b) Penyusunan indikator kinerja pengawasan. Diperlukan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) yang mencakup kualitas gizi, ketepatan distribusi, kecepatan respons pengaduan, dan tingkat kepuasan penerima manfaat.
- c) Pelibatan komite sekolah secara aktif. Komite sekolah perlu diberikan ruang partisipasi yang lebih besar dalam monitoring dan evaluasi program agar tercipta pengawasan partisipatif yang lebih efektif.

Saran Akademik (Research Recommendation)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di satu kabupaten. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan:

- a) Menggunakan pendekatan mixed-method untuk mengukur secara kuantitatif tingkat kepuasan dan efektivitas pengawasan.
- b) Melakukan studi komparatif antar-kabupaten untuk melihat perbedaan praktik pengawasan publik Program MBG.
- c) Mengkaji hubungan antara efektivitas pengawasan publik dan dampaknya terhadap indikator gizi serta capaian akademik siswa.

REFERENSI

Buku

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal Of the American Institute of Planners*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Denhardt, R. B., & Denhardt J.V. (2015). *The New Public Service*. Routledge.
- Handayani, T., Prasetyo, A., & Suryadi, E. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Program Makanan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Kettl, D. F. (2015). *The Transformation of Governance: Public Administration for Twenty-First Century America*. Johns Hopkins University Press.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Miles, M. ., & Huberman, A. . (2014). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Moleong, L. . (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A. (2025). Peran Komite Sekolah dalam Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sleman. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- WHO. (2020). *School Health and Nutrition Program Guidelines*. Geneva: World Health Organization.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Sage Publications.

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indicator of People's Welfare in Pandeglang Regency 2024*. BPS Kabupaten Pandeglang.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Pandeglang Periode 2004–2024*. BPS Kabupaten Pandeglang.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pandeglang 2025*. BPS Kabupaten Pandeglang.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil Kesehatan Indonesia 2023*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- WHO. (2020). *School Health and Nutrition Program Guidelines*. Geneva: World Health Organization.